BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan negara sedang berkembang dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk memperoleh pengetahuan mereka mengenai masalah yang sering terjadi. Sejak itu aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi titik pusat perhatian, yang banyak dan sering dibahas para ekonom dan melahirkan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang sedang dihadapi negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Lincolin Arsyad,1997:5).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, memberikan arah bagi pembangunan negaranya melalui perencanaan-perencanaan pembangunan, yang bersifat menyeluruh, terpadu dan terus-menerus sebagaimana tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Lebih spesifik lagi untuk masalah perencanaan pembangunan ekonomi, Indonesia memiliki apa yang disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang memuat perencanaan-perencanaan pembangunan beserta dengan anggaran pemasukan dan pengeluarannya. Di dalam APBN ini tertuang kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomian Indonesia dalam

jangka pendek (satu tahun) yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Untuk melaksanakan pembangunan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan faktor dana, ada suatu dana yang sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sistem pemerintah Indonesia, dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, mengalami perubahan yang mendasar. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah No.22 dan No.25 tahun 1999 membawa serta berbagai konsekuensi yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, misalnya perubahan struktur organisasi dan penempatan pegawai limpahan dari departemen dan pegawai propinsi. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintah kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan dan moneter-fiskal, menjadi wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah (kabupaten dan kota) merupakan ujung tombak pemerintahan.

Dengan terbitnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya dapat dilaksanakan, baik mengenai urusan maupun di bidang keuangan harus dilakukan dengan sistem manajemen yang profesional. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dituntut agar menyiapkan rencana pembangunan dan menentukan *leading sector* atau prioritasnya, penyusunan anggaran berbasis kinerja, akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta manajemen kekayaan (aset) daerah. Selain dari itu perlu disusun strategi

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan investasi modal *(capital investment)* dengan cara memberikan motivasi supaya investor tertarik untuk menanamkan modal di daerah (Bachrul Elmi, 2002: 19).

Pemerintah daerah juga berwenang untuk menguasai dan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerahnya, disamping dari dana alokasi dan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dengan sejumlah kewenangan itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Beberapa usaha dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada pemerintah daerah karena menyangkut penentuan nilai jual obyek pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan daerah sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

Sistem hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia menujukkan masih adanya sentralisasi yang cukup besar pada pemerintah pusat. Masalah hubungan keuangan pusat-daerah memang bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi sarat dengan muatan masalah ketatanegaraan, politik, dan sosial-budaya. Seiring dengan proses reformasi di segala bidang di Indonesia, sistem keuangan pusat-daerah juga perlu ditingkatkan,

mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan inti dari pembangunan nasional. Kebijakan ini akan lebih menjamin adanya keselarasan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kemampuan keuangan antar daerah dan partisipasi masyarakat masing-masing daerah. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami adalah adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dengan tetap berpegang pada konsep negara kesatuan Indonesia (Jaka Sriyana, 1999: 112).

Sebagai konsekuensi dari cara pengalokasian dana menurut sistem yang sentralistis, maka sering terjadi pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan oleh beberapa departemen, dibiayai dari berbagai sumber dana secara terpisah *(fragmented funding)*, maksudnya adalah satu proyek di daerah dibiayai dari beberapa sumber pembiayaan, misalnya proyek irigasi dibiayai dari DIP Ditjen Pengairan dan Dinas PU Propinsi.

Dalam kondisi sistem pemerintah yang sentralistis terdapat kecenderungan :

1. Kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah begitu besar.
2. Mengakibatkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang tinggi.
3. Minimnya kreativitas dan inovasi pemerintah dan masyarakat di daerah karena selalu menunggu arahan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka sekitar tahun 1980 mulai dilakukan penelitian, penyusunan laporan, seminar-seminar dan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga dan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri. Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diatas adalah :

a. Agar diperoleh gambaran secara pasti mengenai berbagai aspek yang menyangkut pembagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan prosedur administrasi keuangannya.
b. Meningkatkan keterampilan pegawai daerah di bidang keuangan melalui pelatihan.
c. Menyusun konsep rumusan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal dan dapat dianggap adil oleh pemerintah dan masyarakat daerah (Bachrul Elmi, 2002: 9-13).

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang titik beratnya pada kabupaten/ kota, maka daerah kabupaten/ kota dituntut kemandiriannya dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta dalam penyediaan dana yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Kemandirian ini diartikan bahwa tiap daerah harus semakin dapat membiayai pengeluaran dari pendapatan asli daerah karena dirasakan bantuan dari pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan dana daerah, untuk itu sumber pendapatan tersebut harus diupayakan peningkatannya dengan menggali potensi yang dimilikinya.

Pemerintah daerah dan kabupaten/kota harus terus berusaha untuk menggali sumber dana, baik bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sumber dana tersebut diantaranya adalah berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua hal yang penting dalam

mendukung keberhasilan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak pemerintah daerah senantiasa harus mengembangkan serta memberdayakan potensi yang ada di daerahnya, yaitu dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada di daerahnya agar siap mengantisipasi era globalisasi.

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah yang bersangkutan agar pelaksanaannya menjadi terarah dan terpadu. Sehingga tujuan akhir dalam pemanfaatan Pendapatan Asli Dacrah (PAD) untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang No.25 pasal 3 tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Dana Perimbangan; c. Pinjaman Daerah; d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan rutin di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1999 pasal 4, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah kota Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali dan mengkoordinir pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola baik oleh Dipenda kota Yogyakarta maupun yang dikelola oleh instansi di luar Dipenda. Dipenda

senantiasa dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kota Yogyakarta.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat akan mendorong kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin di dalam peningkatan komposisi PAD pemerintah kota dimana penerimaannya dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat,meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan. Di bawah ini tabel mengenai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta selama 22 tahun dan juga tabel mengenai Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah otonom Pemerintahan Kota Yogyakarta selama 22 tahun.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta
(000. Rp)

TAHUN	PAD	PERTUMBUHAN (%)
80/81	1.103.971	-
81/82	1.238.372	10.85
82/83	1.290.997	4.07
83/84	2.811.289	54.07
84/85	2.259.854	-24.40
85/86	2.780.119	18.71
86/87	3.632.927	23.47
87/88	3.314.011	-9.62
88/89	3.777.696	12.27
89/90	4.339.078	12.93
90/91	4.831.770	10.19
91/92	6.542.722	26.15
92/93	7.948.501	17.68
93/94	10.246.386	22.42
94/95	12.549.223	18.35

95/96	14.376.066	12.70
96/97	17.770.955	19.10
97/98	19.154.650	7.22
98/99	19.972.896	4.09
99/2000	24.790.128	19.43
2000	22.452.95	-10.40
2001	40.352.59	44.35

Sumber : BPS Propinsi DI Yogyakarta

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Otonom
Pemerintah Kota Yogyakarta
(000.Rp)

TAHUN	Penerimaan Daerah	Pengeluaran Daerah
80/81	3.394.711	3.277.189
81/82	4.500.778	4.371.006
82/83	5.626.901	5.517.399
83/84	6.351.385	6.349.488
84/85	6.957.961	6.568.686
85/86	8.666.834	8.384.622
86/87	9.568.643	9.568.659
87/88	9.781.551	9.345.785
88/89	10.885.317	9.673.801
89/90	14.126.250	12.620.518
90/91	17.263.364	16.315.966
91/92	19.203.220	18.116.669
92/93	28.420.936	28.195.579
93/94	25.165.619	26.106.040
94/95	35.672.602	32.908.768
95/96	42.857.183	39.349.228
96/97	48.874.460	46.411.543
97/98	58.278.786	55.280.399
98/99	80.626.219	73.582.924
99/2000	105.326.621	93.387.852
2000	108.228.456	89.044.872
2001	243.769.299	243.769.299

Sumber : BPS Propinsi DI Yogyakarta

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan. Pada tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 22.452.95 dan pada tahun 2001 meningkat menjadi

40.352.59 dalam ribu rupiah, sehingga Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 44.35 %.

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa penerimaan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga besarnya pengeluaran Pemerintah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat dari 108.228.456 menjadi 243.769.299 pada tahun 2001 dalam ribu rupiah. Begitu juga tingkat pengeluaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2000 pengeluaran Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat, dari 89.044.872 menjadi 243.769.299 pada tahun 2001 dalam ribu rupiah.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, namun penulis hanya membatasi dari sisi ekonomi saja, yaitu : PDRB perkapita, Jumlah Wisatawan Domestik, Jumlah Industri Besar dan Sedang, serta Jumlah Penduduk.

Faktor pertama yang mempengaruhi PAD adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita ini dapat berasal dari sektor pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, transportasi, bank dan lain-lain.

Faktor kedua yang mempengaruhi PAD adalah jumlah wisatawan domestik. Dimana jumlah wisatawan domestik merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang diperoleh dari hasil retribusi sektor pariwisata.

Faktor ketiga yang mempengaruhi PAD adalah jumlah industri besar dan sedang. Dimana jumlah industri besar dan sedang merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang diperoleh dari sektor pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi PAD adalah jumlah penduduk. Dalam hal ini, penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan. Sebagai faktor pendukung, karena jumlah penduduk yang besar menyediakan sumber tenaga kerja yang besar pula untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar itu tidak mempunyai kualitas yang cukup baik untuk ikut melaksanakan program pembangunan, sehingga jumlah penduduk yang besar hanya akan menambah beban pemerintah saja.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas maka masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen (PDRB per kapita, jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang, serta jumlah penduduk) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta secara individu.

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen (PDRB perkapita, jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang, serta jumlah penduduk) terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta secara serempak.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi aparatur pemerintah daerah dapat menjadi masukan-masukan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan serta penyusunan dalam penelitian ini adalah terdiri dari enam bab, antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.

Berisi gambaran dari daerah penelitian yang meliputi : keadaan geografi, luas wilayah, potensi daerah, keadaan perekonomian Pemerintahan Kota Yogyakarta.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian pustaka atau telaah pustaka dari penelitian sebelumnya yang mendasari pemikiran dan sebagai bahan acuan dalam penyusunan penulisan penelitian ini.

BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan Perundang-undangan yang mendasari sumber-sumber penerimaan pemerintah dan berbagai teori yang relevan dan definisi yang berkaitan dengan penelitian, juga hipotesis yang diutarakan berkaitan dengan landasan teori.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang isi pokok hasil penelitian yang meliputi :

Deskripsi data, hasil estimasi, analisis dan interpretasi data baik pengujian secara individu, uji F-test, koefisien determinasi (R^2) dan pengujian asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi).

BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN

Memuat ungkapan kembali secara singkat permasalahan dan pernyataan dari hasil analisis serta saran yang dianggap relevan dengan permasalahan.

BAB II
TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. KEADAAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" - 110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26" - 07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km^2 atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa.

Sebagian besar jenis tanahnya regosol dengan formasi geologi Batuan Sedimen Old Andesit. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

2.2. KEADAAN PENDUDUK DAN TENAGA KERJA

2.2.1. Jumlah Penduduk

Dari segi kependudukan keadaan penduduk Pemerintah Kota Yogyakarta sampai tahun 2001 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2001 jumlah penduduk Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah 503.954 jiwa, seperti terlihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kota Yogyakarta
Tahun 1995 – 2000

TAHUN	PENDUDUK			PERTUMBUHAN
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	(%)
1995	241.586	227.607	469.193	-
1996	244.484	229.977	474.461	1,11
1997	246.971	231.781	478.752	0,90
1998	249.696	234.064	483.760	1,03
1999	253.213	237.220	490.433	1,37
2000	256.875	240.824	497.699	1,46

Sumber data : Registrasi Penduduk, BPS Kota Yogyakarta

2.2.2. Penyebaran Penduduk

Dari segi kependudukan keadaan penduduk yang diperinci tiap kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2.2., dari tabel tersebut daerah yang kepadatannya paling tinggi adalah kecamatan Ngampilan dengan tingkat kepadatan 28.112 orang/ Km^2. Hal ini dikarenakan daerah kecamatan Ngampilan merupakan daerah perkotaan sehingga kegiatan perekonomian berpusat disini.

Tabel 2.2.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Di Kota Yogyakarta
Tahun 2001

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/ (Km^2)
1	*Mantrijeron*	2,61	39.242	15.035
2	*Kraton*	1,40	32.072	22.909
3	*Mergangsan*	2,31	41.790	18.091
4	*Umbulharjo*	8,12	66.941	8.244
5	Kotagede	3,07	28.408	9.253
6	Gondokusuman	3,99	72.811	18.248
7	Danurejan	1,10	30.642	27.856
8	Pakualaman	0,63	14.790	23.476
9	Gondomanan	1,12	20.532	18.332
10	Ngampilan	0,82	23.052	28.112
11	Wirobrajan	1,76	30.139	17.124
12	Gedongtengen	0,96	26.448	27.550
13	Jetis	1,70	37.959	22.329
14	Tegalrejo	2,91	39.128	13.446

Sumber data : Registrasi Penduduk, BPS Kota Yogyakarta

2.2.3. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2001 tercatat 10.202 orang, yang terdiri dari 87,46% pegawai pemerintah daerah dan 12,54% pegawai pemerintah pusat. Sementara pada tahun 2000 jumlah pegawai pemerintah daerah hanya 3.378 orang. Berarti pada tahun 2001 terjadi kenaikan yang sangat menyolok, yaitu mencapai 202,01%. Hal ini terkait dengan otonomi daerah, sehingga banyak pegawai pemerintah pusat yang dilimpahkan menjadi pegawai pemerintah daerah. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 3,23%, golongan II 25,4%, golongan III 56,01% dan sisanya golongan IV 15,36%.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2001 sebanyak 2.482 orang yang terdiri dari 1.288 laki-laki dan 1.194 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan SMTA (36,91%), Diploma (8,90%), dan sisanya berpendidikan SMTP dan SD.

2.3. PERKEMBANGAN PAD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DARI TAHUN KE TAHUN

Untuk mengetahui perkembangan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun, penulis mengadakan penelitian ke Biro Pusat Statistik DIY dan dari penelitian yang dilakukan diperoleh data perkembangan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta selama 22 tahun dari tahun 1980-2001. Berikut akan diberikan data tersebut.

Tabel 2.3.
Perkembangan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta
(dalam Ribu Rupiah)

TAHUN	PAD	PERTUMBUHAN (%)
80/81	1.103.971	-
81/82	1.238.372	10,85
82/83	1.290.997	4,07
83/84	2.811.289	54,07
84/85	2.259.854	-24,40
85/86	2.780.119	18,71
86/87	3.632.927	23,47
87/88	3.314.011	-9,62
88/89	3.777.696	12,27
89/90	4.339.078	12,93
90/91	4.831.770	10,19
91/92	6.542.722	26,15
92/93	7.948.501	17,68
93/94	10.246.386	22,42

94/95	12.549.223	18,35
95/96	14.376.066	12,70
96/97	17.770.955	19,10
97/98	19.154.650	7,22
98/99	19.972.896	4,09
99/2000	24.790.128	19,43
2000	22.452.950	-10,40
2001	40.352.590	44,35

Sumber : BPS Propinsi DI Yogyakarta

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun PAD Pemerintah Kota Yogyakarta kadang-kadang mengalami peningkatan, kadang-kadang mengalami penurunan. Dari data PAD pada tahun 1980 sampai dengan PAD tahun 2001, PAD terbesar didapatkan pada tahun 2001 dengan besar Rp.40.352.590 sedangkan PAD terkecil diperoleh pada tahun 1980 yaitu Rp.1.103.971.

Ditinjau dari segi sumbernya, PAD berasal dari sektor pajak, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah tersebut menjadi tulang punggung pembangunan daerah yang bersangkutan disamping bantuan pemerintah pusat.

Berikut akan diberikan besarnya kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 1997 – 2001.

Tabel 2.4
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
(dalam ribu Rupiah)

TAHUN	PAD	Pajak	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Dinas	Penerimaan Lain
97/98	19.154.650	10.335.742	7.226.737	612.327	475.319	504.525
98/99	19.972.896	10.266.548	7.157.371	879.375	467.991	1.201.611
99/2000	24.790.128	13.688.831	7.978.503	1.116.628	-	2.006.166
2000	22.452.950	12.025.310	7.126.580	1.926.370	-	1.374.700
2001	40.352.590	22.886.370	11.773.900	2.249.570	-	3.442.750

Sumber : BPS Propinsi DI Yogyakarta.

2.4. FAKTOR-FAKTOR PAD KOTA YOGYAKARTA YANG DIANALISA

Ada empat faktor yang mempengaruhi PAD, yaitu : faktor Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita (PDRB perkapita), faktor jumlah wisatawan domestik, faktor jumlah industri besar dan sedang, serta faktor jumlah penduduk.

Berikut data mengenai ke empat faktor tersebut, lihat tabel 2.5. dibawah ini :

Tabel 2.5.
Data Perkembangan PAD, PDRB perkapita, Jumlah Wisatawan Domestik, Jumlah Industri Besar dan Sedang, serta Jumlah Penduduk Pemerintah Kota Yogyakarta

TAHUN	PAD	PDRB per kapita	Jumlah Wisatawan Domestik	Industri Besar & Sedang	Jumlah Penduduk
80/81	1.103.971	1.320.512	1.382.886	105	385.180
81/82	1.238.372	1.339.924	1.137.082	102	393.385
82/83	1.290.997	1.478.338	1.263.456	103	398.587
83/84	2.811.289	1.478.338	1.204.242	90	409.028
84/85	2.259.854	1.530.376	1.196.725	87	416.037
85/86	2.780.119	1.605.976	1.142.117	132	420.676
86/87	3.632.927	1.696.875	1.198.526	94	427.137
87/88	3.314.011	1.756.774	1.164.349	96	430.573
88/89	3.777.696	1.857.965	1.189.524	95	432.738
89/90	4.339.078	1.970.000	1.243.761	83	438.269
90/91	4.831.770	2.113.219	1.295.634	79	442.581
91/92	6.542.722	2.250.367	1.249.130	104	448.808
92/93	7.948.501	2.380.888	1.179.401	113	452.866
93/94	10.246.386	2.574.931	1.265.790	104	459.417
94/95	12.549.223	2.785.919	1.577.828	108	464.946
95/96	14.376.066	3.052.516	1.467.508	107	469.193
96/97	17.770.955	3.318.896	1.190.243	134	474.461
97/98	19.154.650	3.625.211	1.016.742	129	478.752
98/99	19.972.896	2.872.147	743.739	120	483.760
99/2000	24.790.128	2.913.283	803.910	120	490.433
2000	22.452.950	3.022.537	790.718	120	497.699
2001	40.352.590	3.135.511	529.828	125	503.954

Sumber : BPS Propinsi DI Yogyakarta

BAB III
KAJIAN PUSTAKA

Penulis mengambil beberapa acuan ataupun pedoman dari penelitian sebelumnya yang mendasari pemikiran baik itu permasalahan, landasan teori, model penelitian, analisis data, juga hasil dari penelitian yang telah dicapai sebelumnya yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar pemikiran itu antara lain:

Dari penelitian Jaka Sriyana (1999), mengenai "*Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*". Dengan menggunakan model yang mengacu pada Anwar Shah (1994), adapun model yang digunakan yaitu PAD = f (Yk, Pd) dan pajak = f (Yk, Pd) dimana ;PAD = Pendapatan Asli Daerah; Yk = Pendapatan per kapita; Pd = Jumlah Penduduk. Hasil penelitian yang diperoleh adalah variabel Yk (pendapatan per kapita) dan Pd (jumlah penduduk) merupakan variabel yang cukup penting menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak baik di Pemerintahan Propinsi maupun di Pemerintahan Kabupaten / Kota. Dengan demikian peningkatan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah di Indonesia, selain disebabkan oleh adanya kebijakan perpajakan juga ditentukan oleh peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan jumlah penduduk, khususnya penduduk yang bekerja.

Adapun simpulan dari hasil penelitian itu antara lain sistem hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia menunjukkan masih adanya sentralisasi yang cukup besar pada pemerintah pusat. Masalah hubungan keuangan pusat – daerah memang bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi sarat dengan muatan masalah ketatanegaraan, politik dan sosial budaya. Seiring dengan proses reformasi di segala bidang di Indonesia, sistem keuangan pusat – daerah juga perlu ditingkatkan mengingat bahwa pembangunan daerah merupakan inti dari pembangunan nasional. Kebijakan ini akan lebih menjamin adanya keselarasan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kemampuan keuangan antar daerah dan partisipasi masyarakat masing-masing daerah. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami adalah adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dengan tetap berpegang pada konsep negara kesatuan Indonesia.

Dengan adanya reformasi perpajakan yang ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang tentang perpajakan, memberikan dampak penghapusan beberapa komponen yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menetapkan penerimaan daerah, dengan demikian diharapkan ada peningkatan kemandirian pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dampak lain dari adanya reformasi perpajakan ini adalah peningkatan efisiensi ekonomi nasional sehingga akan merangsang investor untuk menanamkan usahanya di masing-masing daerah. Dalam jangka pendek peningkatan investasi akan berdampak pada peningkatan volume kegiatan ekonomi, sehingga secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan daerah, melalui pajak dan retribusi. Namun demikian agar

dampak reformasi perpajakan terhadap masing-masing daerah bisa maksimal, perlu adanya strategi khusus bagi masing-masing daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dari penelitian Salma Sultan (1997) mengenai *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Pembangunan I Dalam Mendukung Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", studi kasus Kabupaten Dati II Semarang Tahun 1980/1981 – 1995/1996.* Dengan menggunakan model ekonometri PPI = f (X1,X2,X3,...E). Dimana PP I = Realisasi Pajak Pembangunan I ; X1 = Jumlah PDRB per kapita ; X2 = Jumlah wisatawan nusantara ; X3 = Jumlah wisatawan asing. Dari penelitian ini mengkaji sejauh mana (pendapatan per kapita,jumlah wisatawan nusantara,dan wisatawan mancanegara) dapat mempengaruhi penerimaan pajak pembangunan I di Dati II Semarang. Alat analisis yang digunakan meliputi uji regresi, uji statistik, dan pengujian asumsi klasik (multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokolerasi).

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pendapatan per kapita, secara signifikan pada tingkat kepercayaan (99 %) dapat mempengaruhi realisasi Pajak Pembangunan I di Kabupaten Dati II Semarang. Arah kenaikannya adalah positif, artinya kenaikan pendapatan per kapita akan diikuti oleh kenaikan Pajak Pembangunan I. Adapun elastisitas pendapatan per kapita terhadap Pajak Pembangunan I adalah 3,5574. Artinya *ceteris paribus*, apabila terjadi kenaikan terhadap pendapatan per kapita sebesar 1%, maka mendorong kenaikan Pajak Pembangunan I sebesar 3,56 %.

Untuk variabel jumlah wisatawan nusantara, secara signifikan pada tingkat kepercayan (90 %) dapat mempengaruhi realisasi Pajak Pembangunan I di Kabupaten Dati II Semarang. Arah kenaikannya adalah positif, artinya kenaikan jumlah wisatawan nusantara akan diikuti oleh kenaikan Pajak Pembangunan I. Adapun elastisitas jumlah wisatawan nusantara terhadap Pajak Pembangunan I adalah 3,3724. Artinya *ceteris paribus*, apabila terjadi kenaikan terhadap jumlah wisatawan nusantara sebesar 1 %, maka mendorong kenaikan Pajak Pembangunan I sebesar 3,37 %.

Untuk variabel jumlah wisatawan asing, secara signifikan pada tingkat kepercayaan (90%) dapat mempengaruhi realisasi Pajak Pembangunan I di Kabupaten Dati II Semarang. Arah kenaikannya adalah positif, artinya kenaikan jumlah wisatawan asing akan diikuti oleh kenaikan Pajak Pembangunan I. Adapun elastisitas jumlah wisatawan asing terhadap Pajak Pembangunan I adalah 1,5990. Artinya *ceteris paribus*, apabila terjadi kenaikan terhadap jumlah wisatawan asing sebesar 1 %, maka mendorong kenaikan Pajak Pembangunan I sebesar 1,60 %.

Dari penelitian Subur Wiyono (2000) mengenai " *Peranan Retribusi Pariwisata Sebagai Penunjang PAD Kabupaten Tingkat II Klaten Tahun 1993/1994 - 1997/1998* ". Analisis yang digunakan adalah analisis peranan retribusi daerah, analisis efisiensi, analisis efektivitas, analisis laju pertumbuhan, analisis potensi, dan analisis SWOT. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah peran kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, hal tersebut disebabkan masih dominannya sumber dana lain di luar penerimaan retribusi

pariwisata. Dan disini kontribusi penerimaan retribusi pariwisata tidak selalu mengalami peningkatan dari tiap-tiap tahunnya.

Keunggulan dari retribusi pariwisata ini yaitu; retribusi pariwisata mempunyai dasar hukum yang kuat dan dikelola oleh Dinas Pariwisata. Kemudian hasilnya diserahkan kepada daerah sebagai salah satu sumber PAD. Adapun kelemahannya karena kurang kesadaran wajib retribusi yang memiliki obyek wisata berskala kecil untuk membayar retribusi yang telah menjadi kewajibannya. Wajib retribusi tidak mendaftar pada waktu ijin usahanya telah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali.

BAB IV
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Untuk mendukung dan menegaskan permasalahan yang diteliti maka sangat diperlukan konsep dan teori yang saling berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan di dukung oleh beberapa konsep dan teori yang relevan akan sangat membantu dalam menganalisis masalah yang diteliti.

4.1. SISTEM HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT – DAERAH

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi daerah otonom dan wilayah administratif, dimana masing-masing daerah tersebut memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedang wilayah administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.

Lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 5 tahun 1974 bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip-prinsip

pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

1. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
2. Asas Desentralisasi dilaksnakan bersama-sama dengan Asas Demokrasi.
3. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
4. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Pemberian hak otonomi lebih ditekankan pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota karena daerah ini memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sehingga pengembangan dan pelayanan yang diberikan akan lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota diharapkan lebih tanggap terhadap aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat dan selalu berusaha meningkatkan pelayanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya, yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antar sistem pemerintahan daerah

dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pusat, ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan.

Beberapa peneliti atas dasar studinya tentang perekonomian daerah di Indonesia, misalnya: Jaka Sriyana (1999) dan Mudrajad Kuncoro (1995) mengungkapkan bahwa pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan keuangan (fiskal) antara daerah dengan pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya pendapatan dan dominannya bantuan pusat. Realita hubungan fiskal antara pusat – daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah.

4.2. PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada sub bab ini akan dibahas teori-teori mengenai faktor-faktor yang menimbulkan dan menentukan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun teori-teori tersebut dapat disimak pada uraian sebagai berikut :

4.2.1. Teori Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu mulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith

memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan tiitk sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, pendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

4.2.2. Teori Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan kedalam lima tahap yaitu: masyarakat tradisional *(the traditional society)*, prasyarat untuk tinggal landas *(the preconditions for take-off)*, tinggal landas *(take-off)*, menuju kedewasaan *(the drive to manurity)* dan masa konsumsi tinggi *(the age of high mass-comsumption)*.

Dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang

terjadi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensial. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan sektor industri saja. Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti suatu proses yang menyebabkan antara lain :

a. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar.
b. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
c. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah) menjadi investasi yang produktif.
d. Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya perubahan sikap yang tadinya kurang menghargai waktu, kurang menghargai prestasi perorangan, dan sebagainya).

4.2.3. Teori Friedrich List

Menurut List, dalam bukunya yang berjudul *Das nationale der politisvhen oekonomie (1840)*, sistem liberalisme yang *Laize-Faire* dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya sangat tergantung pada peran pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan

perorangan. List juga menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah diantara masyarakat.

Perkembangan ekonomi menurut List, melalui lima tahap yaitu tahap primitif, beternak, pertanian dan industri pengolahan *(manufacturing)*, dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada "cara produksi"nya.

Selain itu List, juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien. Akhirnya, sektor industri pengolahan sangat perlu dikembangkan dalam pembangunan ekonomi, walaupun pada awalnya perlu diberikan proteksi, terutama pada industri yang baru berkembang *(infant industri)*. Di lain pihak sektor pertanian tidak perlu diberi proteksi sebab sektor pertanian akan mendapatkan manfaat dengan sendirinya dari pertumbuhan industri.

4.3. PEMBANGUNAN REGIONAL DAN SEKTORAL

4.3.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijkan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

kekhasan daerah yang bersangkutan *(endogenous development)* dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menafsir potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad,1999:h.298-9)

4.3.2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

4.3.2.1 Teori Ekonomi Neoklasik

Menurut teori ini ada dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan *(equilibrium)* dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa retriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah (Lincolin Arsyad,1999:h.300).

4.3.2.2 Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja *(job creation)*.

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan *(aid)* kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kabijakan mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut (Lincolin Arsyad,1999:h.300).

4.3.2.3 Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral *(central place theory)* menganggap bahwa ada hirarki tempat *(hierarchy of places)*. Setiap tempat sentral di dukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya (Lincolin Arsyad,1999:h.301).

4.3.2.4 Teori Kausa Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori kausa kumulatif *(cumulative causation)*. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah maju dan terbelakang. Dearah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya (Lincolin Arsyad,1999:h.302).

4.3.3. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori pembangunan seperti yang diutarakan dimuka tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif karena masalah pembangunan ekonomi daerah begitu kompleks. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan disini untuk kepentingan perencanaan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (Lincolin Arsyad,1999:h.302).

4.3.4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di

daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, perusahaan besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

4.3.5 Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah

Para ahli ekonomi menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang (NSB), mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada (Lincolin Arsyad,1999:h.303).

4.3.6. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah menurut Lincolin Arsyad (1999:h.306-7) :

Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistic memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

Ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya-sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

4.3.7. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut **Blakely** (1986) ada enam tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 4.1.
Tahapan dan Kegiatan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap	Kegiatan
I	**Pengumpulan dan analisa data** - Penentuan Basis Ekonomi - Analisis struktur tenaga kerja - Evaluasi kegiatan ekonomi - Analisis peluang dan kendala pembangunan - Analisis kapasitas kelembagaan
II	**Pemilihan strategi pembangunan daerah** - Penentuan tujuan dan kriteria - Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan - Penyusunan strategi

III	**Pemilihan Proyek-Proyek pembangunan** - Identifikasi proyek - Penilaian viabilitas proyek
IV	**Pembuatan rencana tindakan** - *Pra penilaian hasil proyek* - *Pengembangan input proyek* - *Penentuan alternatif sumber pembiayaan* - *Identifikasi struktur proyek*
V	**Penentuan rincian proyek** - Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci - Persiapan rencana usaha - Pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian program
VI	**Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi** - Persiapan skedul implementasi rencana proyek - Penyusunan program pembangunan secara keseluruhan - Targeting dan marketing aset-aset masyarakat - Pemasaran kebutuhan keuangan

4.4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan prinsip ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan demikian meningkatnya wewenang pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, peranan keuangan daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif dalam memobilisasi sumber dananya sendiri, disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Sesuai dengan hal itu, daerah dituntut untuk meningkatkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan yang lebih komplek lagi.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu masalah pokok yang selalu memperoleh perhatian adalah masalah kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Beralihnya pembangunan Indonesia dari era migas, dimana sumber investasi terutama berasal dari dana migas yang disalurkan melalui APBN, ke era non migas, dimana sumber utama investasi diharapkan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut dapat ditafsirkan bahwa tiap tingkatan pemerintahan di daerah harus membiayai seluruh keperluannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini untuk lebih mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang merata di seluruh daerah sesuai dengan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka ada lima kebijaksanaan pokok di bidang keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama ini perlu dilanjutkan yaitu :

1. Kebijaksanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, disamping terus meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah. Pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik, memperluas lapangan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor swasta, membantu pengusaha ekonomi lemah, serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.

3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.
4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah. Penyempurnaan sistem informasi terus dilaksanakan sebagai landasan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai dasar perencanaan kegiatan jangka menengah secara tepat. Disamping itu juga dilakukan penyempurnaan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah, agar pembiayaan yang tersedia dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
5. Kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanaman modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.

4.4.1. Sektor Keuangan Pemerintah Daerah

4.4.1.1. Sumber Penerimaan atau Pendapatan Daerah

Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
   - Pajak Daerah
   - Retribusi Daerah
   - Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2. Dana perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Keuangan daerah merupakan semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan termasuk pengeluaran-pengeluaran bagi pembiayaan pembangunan di daerah.

Dalam pengelolaan dan pengurusan bidang keuangan daerah pemerintah daerah memiliki wewenang tersendiri. Wewenang dalam bidang keuangan daerah meliputi :

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana dimaksudkan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974.
2. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana dimaksudkan pasal 62 UU No. 5 Tahun 1974.
3. Penetapan APBD dan penghitungan APBD sebagaimana dimaksudkan pasal 64 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 5 Tahun 1974.

Dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat akan timbul tanggung jawab terhadap semua urusan di bidang keuangan pemerintah daerah tersebut.

4.4.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

APBD merupakan sarana atau alat dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan pasal 64 UU No. 5 Tahun 1974, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi :

a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan Kepala daerah khususnya karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
d. Merupakan suatu saran untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang mudah dan berhasil guna.
e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah di dalam batas-batas tertentu.

Dari uraian di atas dapat pula disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana operasional pemerintah daerah dimana dari satu sisi menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dalam jangka waktu satu tahun, dari sisi lain merupakan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran tersebut. Anggaran dapat diartikan sebagai neraca keuangan dalam

jangka waktu tertentu yang didalamnya menyangkut baik neraca penerimaan maupun neraca pengeluaran untuk masa yang akan datang.

Sebagai fungsi administrasi negara yang lain disamping perencanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan dengan demikian dapat dikatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana dalam jangka waktu tertentu yang menyangkut baik neraca penerimaan maupun neraca pengeluaran (M.Suparmoko,1987:h.59).

2. *Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pasal 64 UU No. 5 Tahun 1974, dalam penyusunannya harus berdasarkan pada GBHN, Repelita dan Pola Dasar Pembangunan Daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang kemudian dijabarkan atau direalisasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan bila telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah masih berpedoman pada beberapa asas berikut :

a. *Balance Budget* yaitu prinsip yang mengusahakan agar terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
b. *Efektifitas dan efisiensi* yaitu agar anggaran yang ditetapkan pemerintah menjadi suatu usaha kearah tercapainya suatu peningkatan sumber

penghasilan secara optimal dengan berpegang teguh pada prinsip terpeliharanya daya kemampuan masyarakat serta keadilan sosial.

c. *Penyusunan program pelaksanaan* dari rencana yang ditetapkan dan penentuan jumlah dana pelaksanaan program-program.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan suatu sistem pendekatan agar anggaran yang dibuat dapat lebih terencana dan terlaksana secara efektif dan efisien. Anggaran disusun dengan berbagai sistem yang dipengaruhi oleh perkiraan-perkiraan penyusunan yang melandasi pendekatan tersebut (Suparmoko,1996:h.4).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari dua tahap yaitu :

a. Tahap perencanaan kegiatan, meliputi :
   - Penentuan tujuan.
   - Pengkajian pengalaman masa lalu.
   - Prospek perkembangan dimasa mendatang.
   - Perencanaan secara umum.

b. Tahap penyusunan program, meliputi :
   - Penyusunan program pelaksanaan program yang ditetapkan.
   - Penentuan jumlah dana untuk pelaksanaan program-program.

Dengan penggunaan pendekatan dari sistem tersebut diharapkan akan lebih memperjelas peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sarana/ alat untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Agar anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengelolaan yang baik pula. Dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikenal dua jenis pengolahan yaitu :

a. Pengurus umum (administrasi)

   Pengurusan umum merupakan pengurusan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran daerah. Penyelenggaraan pengurusan umum dilaksanakan oleh pihak otorisator (Kepala Daerah) dan pihak ordinator (pejabat di bawah Kepala Daerah).

b. Pengurusan Khusus

   Pengurusan khusus dilaksanakan oleh bendaharawan yang dibebani tugas pengurusan dan penyimpanan sebagian dari kekayaan negara yang berupa uang dan barang.

4.4.1.3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Bahwa hasil pemungutan nantinya akan dinikmati kembali oleh masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Terdapat transparansi dan penyederhanaan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Penggalian dan peningkatan potensi.
5. Intensifikasi waskat.
6. Efisiensi dan rasionalisasi biaya pemungutan.
7. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

4.5. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Guritno Mangkoesoebroto,1993:h.181).

Pajak merupakan sumber keuangan pokok daerah disamping retribusi daerah. Dalam UU No. 18 tahun 1997, pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Adapun ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah :

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah ini ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan pembangunan administrasi daerah maka pajak digolongkan menjadi dua :

a. Pajak Daerah Tingkat I

   Pajak Daerah Tingkat I adalah pajak-pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat I, misalnya : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b. Pajak Daerah Tingkat II

   Pajak Daerah Tingkat II adalah pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat II, misalnya : pajak hotel dan restauran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C, pajak tempat usaha, pajak penerangan jalan.

Peningkatan pajak berarti pula peningkatan PAD, akan tetapi peningkatan beban pajak ini tidak dapat dilakukan seenaknya. *Peacock* dan *Wiseman* mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan teori perpajakan *Musgrave.P.B* dan *Musgrave R (1989)* serta *Anwar Shah (1993)* besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan per kapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

a. Prinsip Pemungutan Pajak :

   Untuk memperoleh hasil yang optimal maka pemungutan pajak daerah, harus mendasarkan pada prinsip-prinsip dan kriteria pajak daerah yaitu : potensi dan hasilnya tinggi, memenuhi asas keadilan, administrasi mudah dan murah, pelaksanaannya elastis, dapat diterima secara politisi, serta meningkatkan otonomi daerah.

b. Strategi Pemungutan Pajak :

   Adapun pelaksanaan pemungutannya juga harus memperhatikan beberapa strategi antara lain : jenis pajak sedikit mungkin potensi dan hasilnya besar, administrasinya sederhana, biaya pemungutannya murah, tarif ditentukan dalam prosentase *(advalorem)*, dasar pajak *(tax base)* ditentukan oleh Walikota.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi menurut Munawir (1980:h.3) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dan jasa secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan yang dimaksud bersifat ekonomis karena siapa yang tidak merasakan jasa baik pemerintah maka tidak dikenakan iuran.

Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontra prestasi, dimana tidak ditentukan secara kuantitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah bahwa jenis Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Retribusi jasa umum, meliputi :
    - Pelayanan untuk kepentingan umum.
    - Tujuan pemungutan untuk menyediakan dan memelihara fasilitas-fasilitas umum.
    - Tarif harus memperhitungkan faktor pemilihan biaya dengan subsidi atau subsidi silang.
    - Untuk tujuan tertentu boleh memperhitungkan keuntungan.

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
    - Pungutan atas kegiatan komersil, baik usaha monopoli atau bersaing dengan sektor swasta.
    - Tujuan pemungutan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    - Besarnya pungutan sebesar biaya di tambah keuntungan.
3. Retribusi Perijinan Tertentu, meliputi :
    - Pungutan atas pendaftaran, persetujuan, pemeriksaan, dan pengawasan kegiatan tertentu.
    - Tujuan pemungutan lebih banyak kepada fungsi pengaturan bukan pendapatan.
    - Besarnya pungutan sesuai dengan biaya pemberian biaya perijinan.

> Prinsip-prinsip Pemungutan Retribusi Daerah, antara lain :

Bersifat adil, dapat diterima secara politisi, meningkatkan otonomi daerah, hasilnya dapat membiayai jasa yang diberikan, dan untuk retribusi perijinan tertentu dapat dibiayai dengan subsidi.

> Strategi Pemungutan Retribusi Daerah, antara lain :

1. Kategori Jasa Pelayanan : Jasa umum, jasa usaha dan perijinan.
2. Debirokratisasi Jasa Pelayanan : Kantor pelayanan satu atap.
3. Privatisasi Jasa Pelayanan : Jasa parkir, pasar, terminal bus.

3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Penerimaan yang berupa bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya.

4. Penerimaan Dari Dinas-Dinas

Penerimaan dari dinas-dinas merupakan penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Dinas-dinas yang termasuk disini adalah dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, dinas perikanan dan dinas lainnya yang dikelola oleh suatu daerah.

5. Penerimaan Lain-Lain.

Yang termasuk dalam rincian ini antara lain hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, penerimaan cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan biaya pembinaan dan pengawasan tempat pelelangan ikan, penerimaan setoran biaya pembinaan lembaga keuangan pedesaan, penerimaan biaya untuk mengikuti prakualifikasi, dan lain-lain (Keuangan Daerah,1993:h.1-7).

4.6. UPAYA PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah strategi atau upaya-upaya yang dilakukan, antara lain : (Dipenda Kabupaten/ Kota)

4.6.1 Umum

- Secara umum baik untuk pajak pusat, pajak daerah maupun retribusi daerah pada prinsipnya sama yaitu mengadakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi melalui pendataan di lapangan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat.
- Untuk pengelolaannya, untuk jenis pajak atau retribusi daerah tertentu bekerjasama dengan pihak ketiga, misal retribusi parkir, dimana sistem bagi hasilnya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6.2 Khusus

Pajak pusat yaitu : PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan). Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB dan BPHTB upaya-upaya yang ditempuh, yaitu :

Pekan panutan dan penyuluhan PBB, yaitu dilaksanakan ditiap-tiap Kelurahan yang bertujuan menghimbau kepada para wajib pajak utamanya yang dapat memberikan teladan kepada wajib pajak lain dalam pembayaran PBB.

Sekaligus dalam kegiatan ini diupayakan penyelesaian masalah PBB yang mungkin timbul di Kelurahan yang bersangkutan :

1. Menambah tempat-tempat pembayaran, terutama mendekati waktu jatuh tempo.
2. Penerapan sanksi yang tegas berupa penagihan dan surat paksa, utamanya bagi WP (wajib pajak) yang ketetapannya besar.

4.6.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam hal ini hanya menyoroti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap cukup potensial dalam memberikan kontribusinya pada peningkatan pendapatan daerah.

a. Pajak Daerah

1. Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan.

Upaya yang dilakukan oleh kedua jenis pajak ini adalah sama, antara lain, yaitu :

- Kegiatan pemeriksaan pajak tiap triwulan. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memantau kedisiplinan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengadakan audit atau memeriksa kebenaran atas catatan pembukuan/ keuangan yang diselenggarakannya dibandingkan dengan jumlah setoran pajaknya.

- Kegiatan penungguan, dimaksudkan untuk memantau kepatuhan WP (wajib pajak). Dalam kegiatan ini pajaknya dipungut secara langsung, sehingga dari hasilnya ini akan diperoleh potensi yang sebenarnya dari proyek tersebut.

2. Pajak Reklame

   Upaya yang dilakukan, antara lain :

   - Adanya penataan titik reklame dan pelelangan titik reklame.
   - Penetapan tarif yang berdasarkan Nilai Kontruksi dan Nilai Strategis.
   - Penetapan sanksi berupa pembongkaran reklame, utamanya bagi obyek-obyek terpasang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Pajak Penerangan Jalan

   Yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait (PLN) dengan sistem bagi hasil yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut.

b. Retribusi Daerah

   1. Retribusi Parkir

      Yaitu mengadakan pembedaan tarif antara parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

2. Retribusi Terminal

   • Diupayakan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang, sehingga memacu angkutan bersedia masuk terminal / sub terminal.

   • Mengadakan penungguan disekitar pos/ tempat pembayaran retribusi (TPR). Kegiatan ini semacam survey untuk menghitung potensi pendapatan perhari.

3. Retribusi Pariwisata

   1. Pengertian Retribusi Pariwisata

      Retribusi Pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan baik kepada obyek wisata maupun pungutan yang dikenakan baik kepada obyek wisata maupun kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha obyek pariwisata yaitu :

      a. Retribusi pariwisata merupakan pungutan pada obyek wisata atau biasanya disebut Harga Tiket Masuk (HTM) obyek wisata.

      b. Retribusi Pariwisata yang dipungut sebagai biaya perijinan usaha obyek wisata.

         Retribusi pariwisata sebagai harga tiket masuk obyek wisata dipungut secara langsung kepada setiap wajib retribusi pada saat menikmati fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi pemungutan biaya perijinan ini dilaksanakan

secara berkala dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun sekali yaitu pada saat pendaftaran ulang perijinan obyek wisata tersebut.

2. Tujuan Retribusi Pariwisata

Pemungutan Retribusi Pariwisata ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan secara nyata penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan merupakan kegiatan dalam usaha pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengusahaan obyek wisata di Pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi jelas bahwa retribusi pariwisata tidak hanya sebagai usaha penggalian dana saja, tetapi ada hal yang lebih penting yaitu mengusahakan dan mengembangkan obyek wisata serta pelestarian dan pengembangan dalam kehidupan masyarakat.

4.7. HIPOTESIS PENELITIAN

Dari uraian sekilas tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan yang mendasari penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Yogyakarta, maka penulis mengambil hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

4.7.1. Adanya hubungan positif dari variabel independen (PDRB perkapita) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Yogyakarta, dimana PDRB perkapita memberikan kontribusi terhadap PAD melalui sektor pajak.

4.7.2. Adanya hubungan positif dari variabel independen (jumlah wisatawan domestik) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Yogyakarta, dimana Jumlah Wisatawan Domestik memberikan kontribusi terhadap PAD melalui retribusi pariwisata.

4.7.3. Adanya hubungan positif dari variabel independen (jumlah industri besar dan sedang) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Yogyakarta, dimana jumlah industri besar dan sedang memberikan kontribusi terhadap PAD melalui sektor pajak.

4.7.4. Adanya hubungan positif dari variabel independen (jumlah penduduk) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Kota Yogyakarta, dimana jumlah penduduk memberikan kontribusi terhadap PAD melalui sektor pajak.

BAB V
METODE PENELITIAN

Langkah awal yang diperlukan dalam suatu penelitian yaitu mempersiapkan suatu metode yang relevan dimana bentuk dan coraknya sangat tergantung kepada skope dan obyek penelitian yang digunakan.

5.1. Daerah Penelitian

Daerah penelitian dilakukan di daerah Pemerintahan Kota Yogyakarta.

5.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data-data ini dikumpulkan atau diperoleh dari :

- APBD / RAPBD Pemerintahan Kota Yogyakarta
- Monografi Pemerintahan Kota Yogyakarta
- Laporan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Pemerintah Kota Yogyakarta

5.3. Sumber Data

Data tersebut dikumpulkan dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) bagian Keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan juga dari BPS Propinsi DI Yogyakarta.

5.4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fungsi regresi. Dengan cara ini dapat mengetahui seberapa besar hubungan masing-masing variabel independen/ variabel yang menjelaskan (PDRB perkapita, jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang, serta jumlah penduduk) terhadap variabel dependen/ variabel yang dijelaskan (PAD).

Prosedur analisis yang dilakukan meliputi pengujian variabel-variabel penjelas secara individu, pengujian secara serempak dan tes penyimpangan terhadap asumsi klasik. Secara umum bentuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Persamaan regresi bentuk regresi linier:

$Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 \ldots\ldots\ldots U$

Dimana bo adalah konstanta, b1, b2, b3, b4 adalah merupakan koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Keterangan : Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X1 : PDRB perkapita

X2 : Jumlah wisatawan domestik

X3 : Jumlah industri besar dan sedang

X4 : Jumlah penduduk

5.5. Pengujian Hipotesis Untuk Masing-masing Variabel Independen

Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel independen (PDRB perkapita, jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang, dan jumlah penduduk) dengan variabel dependen (PAD) secara individu.

Ho : b1 $\leq$ 0 , tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara PDRB perkapita terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

H1 : b1 > 0 , ada pengaruh positif dan signifikan antara PDRB perkapita terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ho : b1 $\leq$ 0 , tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Wisatawan Domestik terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ho : b1 > 0 , ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Wisatawan Domestik terhadap terhadap PAD Pemerintah Kota Yoyakarta.

Ho : b1 $\leq$ 0 , tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Industri besar dan sedang terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ho : b1 > 0 , ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Industri besar dan sedang terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ho : b1 $\leq$ 0 , tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ho : b1 > 0 , ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

5.6. Pengujian Hipotesis dengan F-test

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.

Untuk pengujian F-test, dapat dilihat dari nilai signifikansi yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar α = 5 %.Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.

5.7. R^2 (Koefisien Determinan)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi total variabel dependen. Nilai R^2 (koefisien determinan) ini nilainya terletak antara 0 dan 1 ($0<R^2<1$).

5.8. Test Pelanggaran Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya Autokorelasi, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas dalam hasil estimasi. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, maka pengujian hipotesis secara individu, pengujuan secara F-test yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperolehnya.

Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen

lainnya atau dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel independen lainnya. Cara mendeteksinya adalah dengan menggunakan tabel koefisien. Jika semua variabel memenuhi persyaratan yaitu toleransi > 0.1 dan VIF < 5 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Pengujian Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah situasi dimana tidak konstannya varians atau situasi adanya faktor pengganggu yang memiliki varians yang sama (konstan) untuk semua variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan uji *scatter plot*. Dengan uji scatter plot, pada grafik akan terlihat bahwa ada titik-titik berada di sekitar nol dan acak. Maka dapat disimpulkan kalau variabel pengganggu konstan, berarti model tersebut bebas dari heterokedastisitas.

Pengujian Autokorelasi

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Asumsi ini terjadi apabila ada kesalahan pengganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan *Durbin Watson test*. Jika nilai Durbin Watson antara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi, atau tidak ada hubungan kesalahan satu dan yang lainnya.

BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel 6.1 berikut ini

Tabel 6.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
(000.Rp)

TAHUN	PAD	Pertumbuhan (%)
80/81	1.103.971	-
81/82	1.238.372	10,85
82/83	1.290.997	4,07
83/84	2.811.289	54,07
84/85	2.259.854	-24,40
85/86	2.780.119	18,71
86/87	3.632.927	23,47
87/88	3.314.011	-9,62
88/89	3.777.696	12,27
89/90	4.339.078	12,93
90/91	4.831.770	10,19
91/92	6.542.722	26,15
92/93	7.948.501	17,68
93/94	10.246.386	22,42
94/95	12.549.223	18,35
95/96	14.376.066	12,70
96/97	17.770.955	19,10
97/98	19.154.650	7,22
98/99	19.972.896	4,09
99/2000	24.790.128	19,43
2000	22.452.950	-10,40
2001	40.352.590	44,35

Sumber : BPS Propinsi Yogyakarta

Dari tabel 6.1 dapat terlihat bahwa kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran daerah.

Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya merupakan variabel dependen (terikat) yang akan digunakan dalam proses pengujian (estimasi) dengan variabel data lainnya, yang telah disesuaikan. Penelitian ini dititikberatkan pada sektor Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber dana yang penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

6.1.1 PDRB Per Kapita

Data variabel independen pertama adalah PDRB Per Kapita. Data ini diperoleh dari buku "PDRB Pemerintah Kota Yogyakarta" yang dikeluarkan setiap tahun oleh BPS Yogyakarta. PDRB per Kapita merupakan PDRB dibagi jumlah penduduk. Pengertian PDRB itu sendiri bisa dilihat dari tiga sisi yaitu : produksi, pendapatan dan pengeluaran.

Guna mendapatkan series data yang sesuai PDRB ini mengalami penyempurnaan berupa perubahan tahun dasar. Perhitungan PDRB yang sebelumya menggunakan tahun dasar 1993. Jika kita melihat pertumbuhan PDRB per Kapita secara riil, setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 1998 mengalami penurunan.

Tabel 6.2
PDRB per Kapita di Pemerintah Kota Yogyakarta
Berdasarkan Harga Konstan 1993

TAHUN	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan (%)
80/81	1.320.512	-
81/82	1.339.924	1,44
82/83	1.478.338	9,37
83/84	1.478.338	0
84/85	1.530.376	3,40
85/86	1.605.976	4,70
86/87	1.696.875	5,35
87/88	1.756.774	3,40
88/89	1.857.965	5,44
89/90	1.970.000	5,68
90/91	2.113.219	6,77
91/92	2.250.367	6,09
92/93	2.380.888	5,48
93/94	2.574.931	7,53
94/95	2.785.919	7,57
95/96	3.052.516	8,72
96/97	3.318.896	7,48
97/98	3.625.211	9,00
98/99	2.872.147	-26,21
99/2000	2.913.283	1,41
2000	3.022.537	3,61
2001	3.135.511	3,60

Sumber :BPS Propinsi Yogyakarta

6.1.2 Jumlah Wisatawan Domestik

Data variabel independen kedua adalah jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke obyek wisata yang ada di pemerintah kota Yogyakarta, yang tercatat pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kota. Adapun obyek wisata yang menjadi kunjungan wisatawan domestik itu adalah obyek wisata : Keraton Yogyakarta, Kebun Binatang Gembira Loka dan Taman Sari.

Tabel 6.3
Perkembangan Pengunjung Obyek Wisata
(Wisatawan Domestik)

TAHUN	Jumlah Pengunjung	Pertumbuhan (%)
80/81	1.382.886	-
81/82	1.137.082	-21,61
82/83	1.263.456	10,00
83/84	1.204.242	-4,91
84/85	1.196.725	-0,62
85/86	1.142.117	-4,79
86/87	1.198.526	4,70
87/88	1.164.349	-2,93
88/89	1.189.524	2,11
89/90	1.243.761	4,37
90/91	1.295.634	4,00
91/92	1.249.130	-3,72
92/93	1.179.401	-5,91
93/94	1.265.790	6,82
94/95	1.577.828	19,78
95/96	1.467.508	-7,51
96/97	1.190.243	-23,30
97/98	1.016.742	-17,07
98/99	743.739	-36,70
99/2000	803.910	7,49
2000	790.718	-1,67
2001	529.828	-49,24

Sumber :BPS Propinsi Yogyakarta

Dari tabel 6.3 terlihat bahwa perkembangan jumlah pengunjung yang berkunjung ke obyek wisata yang ada di pemerintah kota Yogyakarta tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh dari retribusi pariwisata.

6.1.3 Jumlah Industri Besar dan Sedang

Data variabel independen ketiga adalah jumlah industri besar dan sedang di pemerinah kota Yogyakarta (lihat tabel 6.4)

Tabel 6.4
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang

TAHUN	Jumlah Industri Besar	Jumlah Industri Sedang	Jumlah Industri	Pertumbuhan (%)
80/81	14	91	105	-
81/82	14	88	102	-2,94
82/83	44	59	103	0,98
83/84	42	48	90	-14,45
84/85	40	47	87	-3,45
85/86	14	118	132	34,10
86/87	13	81	94	-40,42
87/88	15	81	96	2,09
88/89	14	81	95	-1,06
89/90	18	65	83	-14,46
90/91	19	60	79	-5,07
91/92	20	84	104	24,03
92/93	19	94	113	7,97
93/94	20	84	104	-8,66
94/95	20	88	108	3,70
95/96	20	87	107	-0,93
96/97	17	117	134	20,14
97/98	18	111	129	-3,88
98/99	21	99	120	-7,5
99/2000	16	104	120	0
2000	17	103	120	0
2001	18	107	125	4

Sumber :BPS Propinsi Yogyakarta

6.1.4 Jumlah Penduduk

Data variabel independen keempat adalah jumlah penduduk Pemerintah Kota Yogyakarta (lihat tabel 6.5)

Tabel 6.5
Jumlah Penduduk
(Jiwa)

TAHUN	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
80/81	385.180	-
81/82	393.385	2,09
82/83	398.587	1,30

83/84	409.028	2,56
84/85	416.037	1,69
85/86	420.676	1,51
86/87	427.137	0,80
87/88	430.573	0,50
88/89	432.738	1,27
89/90	438.269	1,27
90/91	442.581	0,98
91/92	448.808	1,39
92/93	452.866	0,90
93/94	459.417	1,42
94/95	464.946	1,19
95/96	469.193	0,90
96/97	474.461	1,11
97/98	478.752	0,90
98/99	483.760	1,03
99/2000	490.433	1,37
2000	497.699	1,46
2001	503.954	1,24

Sumber :BPS Propinsi Yogyakarta

6.2. ANALISIS HASIL REGRESI

Pada sub bab ini menjelaskan hasil regresi yang menggunakan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas secara statistik. Prosedur analisis yang dilakukan meliputi pengujian variabel-variabel penjelas secara individu, pengujian secara serempak dan tes penyimpangan terhadap asumsi klasik.

6.2.1. Pengujian Hasil Regresi

Untuk mempermudah proses estimasi dan untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, maka proses estimasi dalam penelitian ini

menggunakan program SPSS. Adapun proses dan hasil regresi adalah sebagai berikut:

Pendefinisian Variabel :

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD) (ribu rupiah)

X1 : PDRB per kapita (ribu rupiah)

X2 : Jumlah wisatawan domestik (orang)

X3 : Industri Besar dan Sedang (buah)

X4 : Jumlah Penduduk (jiwa)

Untuk menganalisis data di atas maka dilakukan cara analyze>regression>linear dengan menggunakan Ouput Program SPSS,dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.6
Hasil Regresi Antara Variabel Dependen
Dengan Variabel Independen

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-Statistik	Nilai Signifikansi P-Value
Konstanta	6815486	1,9E+07	0,362	0,722
X1	8,735	2,464	3,544	0,002
X2	- 19,146	4,065	- 4,710	0,000
X3	6493,595	74298,726	0,087	0,931
X4	10,900	38,692	0,282	0,782

Sumber data diolah, Lampiran 1

R-Squared = 0,886

Adjusted R-Squared = 0,859

Durbin-Watson = 1,326

Sumber Data diolah dari SPSS,2004

6.2.2. Uji Hipotesis Untuk Masing-Masing Variabel Independen

A. Uji hipotesis satu sisi untuk koefisien variabel PDRB perkapita **(X1)**

- Ho : bo ≤ 0 → Tidak terdapat hubungan antara PAD dan PDRB perkapita
- H1 : b1 > 0 →Terdapat hubungan positif antara PAD dan PDRB perkapita
- Tingkat signifikansi α = 5%
- Daerah kritik, Ho ditolak jika nilai signifikansi (P-value) < 0,05
- Dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi (P-value) = 0,002 < 0,05. Maka Ho ditolak, yang berarti bahwa nilai koefisien variabel independen X1 berpengaruh positif dan signifikan terbukti.

B. Uji hipotesis satu sisi untuk koefisien variabel Jumlah Wisatawan Domestik **(X2)**

- Ho : b2 ≤ 0 → Tidak terdapat hubungan antara PAD dan Jumlah Wisatawan Domestik
- H1 : b2 > 0 → Terdapat hubungan positif antara PAD dan Jumlah Wisatawan Domestik
- Tingkat signifikansi α = 5%
- Daerah Kritik, Ho ditolak jika nilai signifikansi (P-value) < 0,05

- Dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi (P-value) = 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak, yang berarti bahwa nilai koefisien variabel independen X2 signifikan untuk model persamaan regresi.

C. Uji hipotesis satu sisi untuk koefisien variabel Jumlah Industri Besar dan Sedang **(X3)**

- Ho : $b3 \leq 0 \rightarrow$ Tidak terdapat hubungan antara PAD dan Jumlah Industri Besar dan Sedang
- H1 : $b3 > 0 \rightarrow$ Terdapat hubungan positif antara PAD dan Jumlah Industri Besar dan sedang
- Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$
- Daerah kritik, Ho ditolak jika nilai signifikansi (P-value) < 0,05
- Dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi (P-value) = 0,931 > 0,05.Maka Ho diterima, yang berarti bahwa nilai koefisien variabel X3 tidak signifikan untuk model persamaan regresi diatas.

D. Uji hipotesis satu sisi untuk koefisien variabel independen Jumlah Penduduk **(X4)**

- Ho : $b4 \leq 0 \rightarrow$ Tidak terdapat hubungan antara PAD dan Jumlah Penduduk
- H1 : $b4 > 0 \rightarrow$ Terdapat hubungan positif antara PAD dan Jumlah Penduduk
- Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$

- Daerah kritik, Ho ditolak jika nilai signifikansi (P-value) < 0,05
- Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi (P-value) = 0,782 > 0,05. Maka Ho diterima, yang berarti bahwa nilai koefisien variabel X4 tidak signifikan untuk model persamaan regresi diatas.

6.2.3. Uji F-Statistik

Untuk uji F, dapat dilihat dari nilai signifikansi yang kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$. Dari tabel (lihat lampiran) diperoleh nilai F-statistik = 32,939 dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < \alpha = 0,05$. Maka Ho ditolak (signifikan), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.

6.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

R square = 0,886, Nilainya mendekati 1 , berarti bahwa model regresi cukup baik, artinya ada hubungan yang cukup erat antara variabel independen dan variabel dependennya.

Dalam Analisis Regresi linear berganda yang digunakan adalah adjusted R Square.Adjusted R square sebesar 0,859 menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara variabel independen dan variabel dependen cukup kuat. Karena semakin mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat/erat.

Adjusted R square 0,859,hal ini berarti bahwa 85,9% variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen.Sedangkan sisanya (100% - 85,9% = 14,1%) dijelaskan oleh sebab – sebab lain. Standar error = 3807217,489.(lihat lampiran).

Model persamaan yang baik mempunyai R tinggi.adjusted R square tinggi , dan standar error rendah.

6.2.5. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas , heterokedastisitas, dan auto korelasi dalam estimasi. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut , maka uji hipotesis yang telah dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh .

a. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi yang digunakan. Untuk menguji multikolinearitas digunakan tabel koefisien. Pada tabel koefisien, terlihat pada bagian kolinearitas statistik,terdapat adanya hubungan yang kuat,yaitu dengan syarat tolerance > 0,1 dan VIF < 5.(lihat lampiran)

Tabel 6.7
Tabel Uji Multikolinearitas

Model	t-Statistik	Signifikansi	Kolilearitas Stat	
			Toleransi	VIF
Konstanta	0,362	0,722	-	-
X1	3,544	0,002	0,219	4,565
X2	-4,710	0,000	0,712	1,405
X3	0,087	0,931	0,500	2,000
X4	0,282	0,782	0,277	3,615

Sumber data diolah

Dari tabel diatas,semua variabel memenuhi persyaratan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas digunakan *uji scatter plot* (lihat lampiran).

Dari grafik, diketahui bahwa ada titik-titik berada disekitar nol dan acak, maka dapat disimpulkan kalau variabel pengganggu konstan,berarti model tersebut bebas dari heterokedastisitas.

c. Uji Autokolerasi

Asumsi ini terjadi apabila ada kesalahan pengganggu suatu periode berkolerasi dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan Durbin Watson Test (lihat lampiran)

Tabel 6.8
Analisis Output Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standar Error	Durbin-Watson
1	0,941[a]	0,886	0,859	3807217,489	1,326

a. Prediktor : (konstanta),X4,X2,X3,X1
b. Variabel dependen : Y

Analisis Output Model Summary :

Jika nilai Durbin-Watson antara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokolerasi, atau tidak ada hubungan kesalahan (error) satu dan yang lainnya. Dari tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson = 1,326, berarti nilainya terletak di antara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokolerasi, atau tidak ada hubungan kesalahan (error) satu dan yang lainnya.

6.2.6. Interpretasi Masing-masing Variabel Independen

Dari hasil regresi pada tabel 5.6. diatas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 6815486 + 8{,}735\ X1 - 19{,}146\ X2 + 6493{,}595\ X3 + 10{,}900\ X4$$

Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. bo = 6815486 , artinya jika PDRB perkapita, jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang serta jumlah penduduk adalah 0 , maka besarnya PAD adalah 6815486 ribu rupiah.

2. b1 = 8,735. Tanda parameter untuk PDRB perkapita adalah positif, yang berarti jika PDRB perkapita naik sebesar 1 ribu rupiah, maka PAD akan naik sebesar 8,735 ribu rupiah dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
3. b2 = - 19,146. Tanda parameter untuk variabel Jumlah Wisatawan Domestik adalah negatif, yang berarti jika jumlah wisatawan domestik naik sejumlah 1orang maka PAD akan berkurang sebesar 19,146 ribu rupiah dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh :

1. a. Variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

   b. Variabel jumlah wisatawan domestik berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

   c. Variabel jumlah industri besar dan sedang tidak signifikan terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta, jadi hipotesis tidak terbukti.

   d. Variabel jumlah penduduk tidak signifikan terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta, jadi hipotesis tidak terbukti.

2. Variabel jumlah industri besar dan sedang, tidak signifikan menurut statistik.

   Dari analisis yang dilakukan terdahulu, dapat diambil simpulan bahwa keberadaan industri besar dan sedang di Pemerintah Kota Yogyakarta belum memberikan sumbangan yang nyata bagi penerimaan PAD,karena justru industri kecil yang memberikan sumbangan yang nyata penerimaan PAD di Pemerintah Kota Yogyakarta.

   Variabel jumlah penduduk tidak signifikan menurut statistik, hal ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk belum tentu meningkatkan penerimaan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Dengan pengujian secara serempak, menunjukkan bahwa variabel independen yaitu : PDRB per Kapita, jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang, dan juga jumlah penduduk, bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen yaitu PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Dari penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa variabel PDRB perkapita, variabel jumlah wisatawan domestik, variabel jumlah industri besar dan sedang serta jumlah penduduk merupakan variabel yang cukup penting yang menentukan besarnya penerimaan PAD sementara dalam penelitian ini variabel jumlah industri besar dan sedang serta variabel jumlah penduduk belum memberikan sumbangan yang nyata terhadap penerimaan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

7.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu : PDRB perkapita, Jumlah Wisatawan Domestik. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan PDRB per kapita misalnya adanya pembangunan untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai untuk menunjang kegiatan produksi yang pada akhirnya mendorong laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PAD dan juga menggalakkan sumber-sumber penerimaan PAD yang lain seperti mengembangkan sektor pariwisata sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Variabel-variabel independen yang paling berpengaruh terhadap PAD adalah variabel PDRB perkapita, sedangkan variabel yang lain seperti jumlah wisatawan domestik, jumlah industri besar dan sedang serta jumlah penduduk belum memberikan sumbangan yang nyata terhadap penerimaan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk itu diperlukan kebijakan Pemerintah Kota untuk meningkatkan volume kegiatan ekonomi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan penerimaan daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pajak dan retribusi.